

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- AR, Mustopadidjaja. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bawaslu. *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014.
- Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Predana Media Group, 2018.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kristanten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 14 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Pemilihan Umum “Sebuah Literasi Politik.”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Rush, Michael, dan Phillip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sedarmayanti, dan Yaya Mulyana A. Aziz. *Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Supriyanto, Didik, dan Lia Wulandari. *Basa-Basi Dana Kampanye (Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu)*. 1 ed. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem, 2013.
- Wajdi, Farid, dan Andryan. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Diedit oleh Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Winardi. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Nadi Pustaka, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Black, Henry Campbell, dan Joseph R. Nolan. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. IV. St. Paul: West Publishing Company, 1968.
- Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, Pub. L. No. 15 (2023).
- . Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7 (2022).
- . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Pub. L. No. 18 (2023).
- . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 3 (1999).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7 (2017).

Karya Ilmiah

- Ahmad, Jamaluddin. “Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang.” *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi* 1, no. 1 (Agustus 2012): 1–15. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55678/jia.v1i1.28>.
- Bonahuta, Julian Immanuel. “Menganalisis Pemanfaatan Metode Fast Track Legislation Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2023.
- Dahtiar. “Penerapan Teori Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (12 Juli 2022): 120–42. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.70>.
- Dardias, Bayu. “Mewujudkan Transparansi Menuju Pemerintahan Bersih.” *JIP & PLOD UGM*, 2009, 35–52.
- Esther, July. “Rekonstruksi Sistem Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (10 Juni 2020): 151–70. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>.
- Hermanto, Rudi. “Problematisasi Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (Mei 2020): 1–23.
- Ma'mun, Abdul Rahman. “Konflik Kepentingan Dalam Regulasi Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilu Presiden 2019.” *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (14 Juli 2022): 62–69.

- <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55904/histeria.v1i2.268>.
- Nusantara, Galuh Cahya. “Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Kasus Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015).” Diedit oleh Nur Hidayat Sardini. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018.
- Prasetyo, Wegik. “Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05, no. 1 (26 Juni 2019): 15–27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336.15-27>.
- Putra, Hermansyah. “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 6, no. 2 (28 Desember 2018): 112–21. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1622>.
- Raditya, I Gusti Ngurah Agung Sayoga. “Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) Dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis di Indonesia.” Universitas Udayana, 2013.
- Said, M.Yasir, dan Yati Nurhayati. “A Review on Rawls Theory of Justice.” *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (28 April 2021): 29–36. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.7>.
- Setiadi, Wicipto. “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (Desember 2009): 603–14.
- Setiawan, Hendra Budi, dan Tabah Maryanah. “Optimilisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1166–75. <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023>.
- Suryani, Ni Nyoman Sonia Santhy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Sanksi Pidana terhadap Kecurangan dalam Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (30 April 2022): 461–65. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4963.461-465>.
- Tanjung, Muhammad Iqbal. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” Univesitas Jambi, 2022.
- Tosika, Metrina, Khairul Fahmi, dan Asrinaldi. “Integrasi Laporan Keuangan Dan Dana Kampanye Partai Politik Tentang Audit Yang Hanya Formalitas Semata.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (6 November 2020): 39–56.
- Wardani, Putri Pramudya. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang).”

Universitas Brawijaya, 2021.

Zulfakar AR, Andi Baso. "Hakikat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia = The Nature of Law Enforcement of Legislative Election Crimes In Indonesia." Universitas Hasanuddin, 2023.

Sumber Lainnya

Jackson, Robert. L. "Clinton Donor Riady Pleads Guilty to Conspiracy Charge." Los Angeles Times, 12 Januari 2001. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-jan-12-mn-11506-story.html>.

Kurniawan, Moh. Afaf El. "Penghapusan Kewajiban Laporan Dana Kampanye oleh KPU Menuai Kontroversi." Narasi TV, 2023. https://narasi.tv/read/narasi-daily/penghapusan-kewajiban-laporan-dana-kampanye-oleh-kpu-menuai-kontroversi#google_vignette.

Muzaki, Aji Fuad. "Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu 2024." Rumah Pemilu, 2023. <https://rumahpemilu.org/urgensi-transparansi-dan-akuntabilitas-pemilu-2024/>.

Rumah Pemilu Admin. "Bawaslu Perlu Diberi Kewenangan Audit Investigasi Dana Kampanye." Rumah Pemilu, 2020. <https://rumahpemilu.org/bawaslu-perlu-diberi-kewenangan-audit-investigasi-dana-kampanye/>.

Salabi, Amalia. "ICW: Perlu Ada Regulasi Pelaporan Dana Kampanye yang Jamin Akuntabilitas." Rumah Pemilu, 2019. <https://rumahpemilu.org/icw-perlu-ada-regulasi-pelaporan-dana-kampanye-yang-jamin-akuntabilitas/>.

Satrio, Bhakti. "Koalisi Masyarakat Indonesia Antikorupsi Minta Bawaslu Desak KPU untuk Kembali Mengatur LPSDK." Bawaslu, 2023. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/koalisi-masyarakat-indonesia-antikorupsi-minta-bawaslu-desak-kpu-untuk-kembali-mengatur-lpsdk>.